

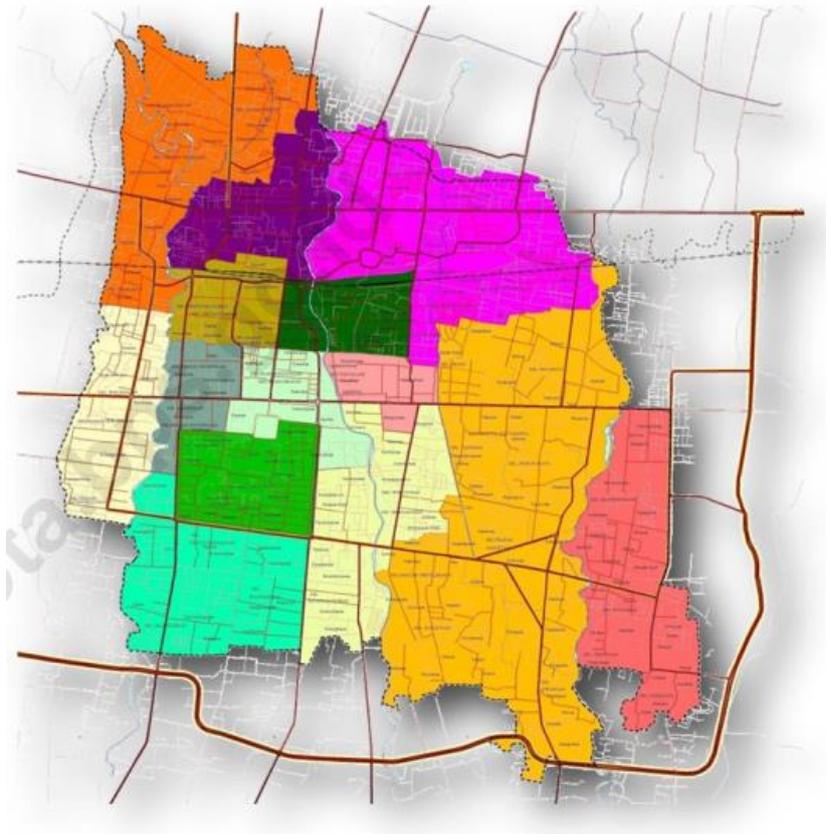
BAB IV

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

1.1 Profil Kota Yogyakarta

1.1.1 Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ}15'24''$ - $07^{\circ}49'26''$ Lintang Selatan, dengan luas sekitar $32,5 \text{ Km}^2$ atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Yogyakarta. Jarak terjatuh dari Utara ke Selatan Kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km (BPS KY, 2018).



Gambar 4.1

Peta Yogyakarta

(Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2018)

1.1.2 Pemerintahan

Yogyakarta lebih aman dari gejolak perubahan wilayah administrasi. Pemekaran wilayah terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian Kota Yogyakarta termasuk salah satu daerah tingkat dua sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 2001, jumlah wilayah administrasi di Yogyakarta tidak mengalami perubahan baik yang diakibatkan pemekaran maupun penggabungan. Jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan. Sementara itu, jumlah kelurahan di kota Yogyakarta sebanyak 45 kelurahan, 616 rukun warga (RW) dan 2532 rukun tetangga (RT) (BPS KY, 2018).

Tabel 4.1
Jumlah Wilayah Administrasi di Kota Yogyakarta

Wilayah Administrasi	2015	2016	2017
Kecamatan	14	14	14
Kelurahan	45	45	45
Rukun Warga	616	616	616
Rukun Tetangga	2532	2532	2532

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2018

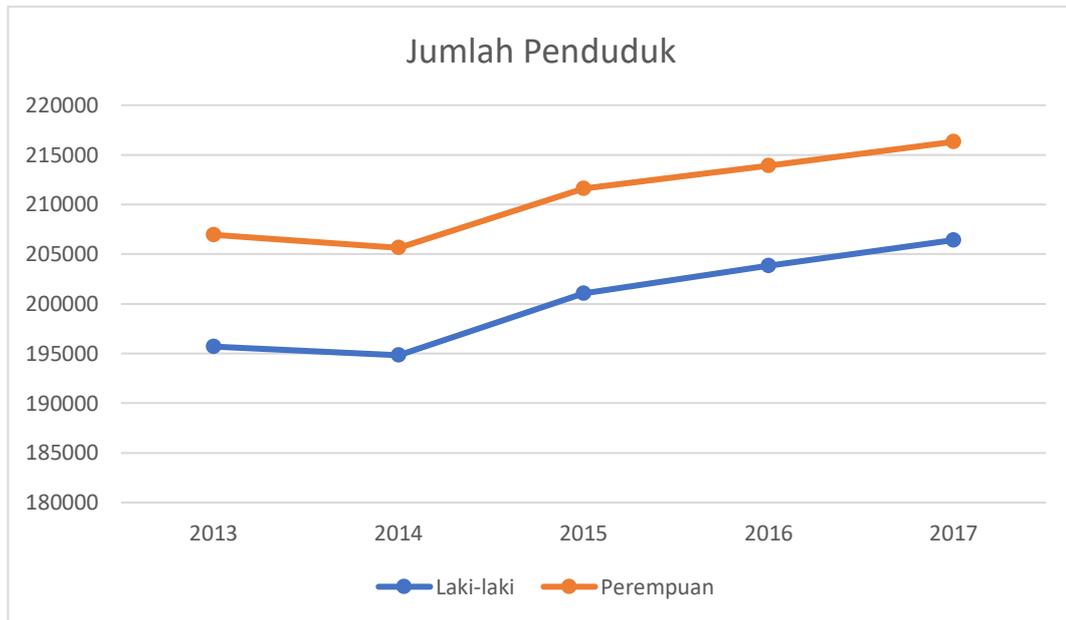
14 Kecamatan di Kota Yogyakarta ada 8 Kecamatan yang menjadi Kecamatan percontohan Kota Inklusif, yaitu Godokusuman, Tegalrejo, Wirobrajan, Kotagede, Jetis, Kraton, Gedongtengen, dan Mantrijeron.

Tabel 4.2
Kecamatan di Kota Yogyakarta

1. Mantrijeron	8. Pakualaman
2. Kraton	9. Gondomanan
3. Mergagan	10. Ngampilan
4. Umbulharjo	11. Wirobrajan
5. Kotagede	12. Gedongtengen
6. Godokusuman	13. Jetis
7. Danurejan	14. Tegalrejo

1.1.3 Penduduk

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2017 menurut proyeksi Badan Pusat Statistik sebanyak 422.732 jiwa dengan rincian sebanyak 206.421 jiwa penduduk laki-laki dan 216.311 jiwa penduduk perempuan.



Grafik 4.1
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta
Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Setiap tahunnya penduduk di Kota Yogyakarta terus meningkat, dan presentasinya jumlah perempuan selalu lebih banyak dari jumlah laki-laki. Berdasarkan data kependudukan jumlah lansia di Kota Yogyakarta setiap tahunnya juga mengalami peningkatan karena angka hidup di Kota Yogyakarta tergolong tinggi.

1.2 Profil Stakeholder

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, data dan statistik, dalam melaksanakan tugas, Bappeda menyelenggaraan fungsi perumusan kebijakan di bidang perencanaan; mengkoordinasikan penyusun perencanaan pembangunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Bappeda Kota Yogyakarta memiliki visi menjadi Perencana Pembangunan Daerah yang professional, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, misi yang di usung adalah melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Bappeda; menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas; melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; mewuudkan data yang lengkap, akurat dan mutakhir; dan melakukan penelitian dan pengembangan yang implementatif (Bappeda, 2017)

2. Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dinas

Sosial Kota Yogyakarta mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Sosial; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial; Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Sosial; Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang Sosial; pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan usulan pemerintahan di bidang Sosial.

Visi dari Dinsos sendiri adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat berlandaskan nilai kemandirian dan semangat gotong royong, sedangkan misi Dinsos, yaitu: Mengembangkan ketersediaan data sebagai pusat informasi kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas perlindungan dan jaminan sosial dengan semangat gotong royong; meningkatkan advokasi dan rehabilitasi sosial dalam penanganan PMKS; dan meningkatkan pemberdayaan PSKS untuk mewujudkan kemandirian PMKS (DINSOS, 2017)

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)

DPMPPA merupakan salah satu organisasi perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak (DPMPPA, 2017).

Terwujudnya kemandiriann, keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak merupakan visi dari DPMPPA. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; mewujudkan kebijakan yang responsive gender berkesetaraan dan berkeadilan gender; dan mewujudkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah visi dari DPMPPA.

4. Dinas Koperasi, UKM Nakertrans

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki visi terwujudnya koperasi dan UMK yang berkualitas dan berdaya saing menuju kemandirian masyarakat dan penanganan ketenagakerjaan serta ketransmigrasian yang berkelanjutan.

Mewujudkan profesionalisme SDM dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan system informasi yang sederhana, jelas, dan transparan sesuai standar; meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan kemitraan; meningkatkan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja serta ketransmigrasian yang berkelanjutan; dan

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong tenaga kerja yang mandiri dan handal serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis merupakan misi (Dinas Koperasi, UKM, Nakestrans, 2017).

5. SAPDA

Lembaga SAPDA merupakan singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak. Sapda memiliki Visi, Misi dan rencana strategis tahun 2017-2020. Visi yang di usung SAPDA adalah perjuangan mewujudkan perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan hak asasi manusia, sedangkan misi SAPDA melakukan kajian keilmuan dan penelitian ilmiah; memperjuangkan terwujudnya kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan, difabel dan anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan; melakukan pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel dan anak dikalangan masyarakat luas; menjalin kerjasama dengan stakeholder berkaitan dengan penanganan persoalan, difabel dan anak; membangun sapda sebagai crisis center bagi perempuan, difabel dan anak; dan mewujudkan pusat sumber informasi, data, pengetahuan dan pembelajaran tentang Perempuan.

6. Dria Manunggal

Dria Manunggal adalah Lembaga kajian dan pelatihan tentang difabilitas untuk transformasi sosial. Lembaga Dria Manunggal berazaskan Pancasila dengan dasar konstitusional Undang-undang Dasar 1945.

Maksud didirikannya lembaga Dria Manunggal adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, potenssi dan kemampuan, serta keberdayaan difabel;
- 2) Mendorong perluasan kesadaran, pengakuan, penerimaan dan penghormatan masyarakat terhadap keberadaan dan martabat difabel;
- 3) Mendorong perwujudan pemenuhan, perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi difabel

Lembaga Dria Manunggal didirikan dengan tujuan agar terwujud kesetaraan hak difabel dalam tatanan kehidupan yang inklusif paripurna (ber-Bhinneka Tunggal Ika) dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, lembaga Dria Manunggal menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Penghormatan atas martabat yang melekat dan otoritas individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian individu dalam kehidupannya;
- 2) Nondiskriminasi;
- 3) Partisipasi dan keterlibatan penuh secara efektif dan inklusif bagi para difabel dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- 4) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan individu difabel sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- 5) Kesetaraan kesempatan;
- 6) Aksesibilitas;
- 7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- 8) Penghormatan atas kapasitas yang berkembang pada anak-anak difabel dan penghormatan atas hak anak untuk melindungi identitas individu mereka.

Dalam melaksanakan kegiatannya lembaga Dria Manunggal bersifat terbuka, kekeluargaan, dan gotong-royong tanpa membedakan suku, agama/kepercayaan, etnik, dan golongan.

Untuk mencapai tujuannya, strategi yang digunakan oleh lembaga Dria Manunggal adalah membangun gerakan transformasi sosial dengan mengedepankan peran difabel (sebagai bentuk *affirmative action*)

7. Badan Sosial Mardi Wuto

Badan Sosial Mardi Wuto merupakan badan usaha di bidang sosial yang merupakan salah satu unit kerja Yayasan Dr. Yap Prawirohusodo, dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat disabilitas netra, dan berpegang teguh pada prinsip layanan tanpa membedakan agama, suku dan status sosial selain itu lembaga sosial Mardi Wuto juga melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya para disabilitas netra menuju ke mandirian (Mardi Wuto, 2018).

Jumlah anggota disabilitas netra Badan Sosial Mardi Wuto ada 450 orang terdiri dari Pelajar, Mahasiswa, dan orang dewasa. Ny. Sri Budiastuti Soenandar, SH. merupakan ketua dari Badan Sosial Mardi Wuto yang memiliki program jangka pendek, menengah dan panjang dari kegiatan rutin (berkesinambungan) yaitu pelatihan dan pendampingan; perpustakaan buku braille, kaset bicara dan E-book; pembinaan dan program peduli.

8. Kecamatan Percontohan Kota Inklusif

Kecamatan percontohan merupakan Kecamatan yang telah bersedia menjadi Kecamatan Inklusif.

a) Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman memiliki luas wilayah 3,98 km² dengan kepadatan penduduk 106,25 jiwa/ha yang merupakan kecamatan terluas kedua setelah Umbulharjo. Kecamatan Gondokusuman dibagi menjadi 5 wilayah kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Baciro
2. Kelurahan Demangan
3. Kelurahan Klitren
4. Kelurahan Kotabaru
5. Kelurahan Terban

b) Kecamatan Tegalrejo

Kecamatan Tegalrejo memiliki luas wilayah 2,91 km² atau 8,95 persen dari luas Kota Yogyakarta. Kecamatan Tegalrejo menduduki peringkat ketiga untuk luas wilayah setelah Kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman. Kecamatan Tegalrejo terbagi menjadi 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Tegalrejo, Bener, Kricak, dan Karangwaru.

c) Kecamatan Wirobrajan

Letak wilayah Kecamatan Wirobrajan berada di tepi barat Kota Yogyakarta, masyarakatnya memiliki keanekaragaman kegiatan ekonomi, sebagian besar adalah sektor industri kerajinan rumah tangga.

Kecamatan Wirobrajan pada akhir tahun 2017 memiliki luas wilayah 1,76 km², terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Patangpuluhan 0,44 km², Kelurahan Wirobrajan 0,67 km², dan Kelurahan Pakuncen 0,65 km².

d) Kecamatan Kotagede

3,07 km² merupakan luas wilayah Kecamatan Kotagede, dengan jumlah wilayah tersebut Kecamatan Kotagede dibagi menjadi 3 Kelurahan: Kelurahan Prenggan, Purbayan dan Rejowinangun, di Kecamatan ini memiliki 40 RW serta 165 RT. Keadaan daerah lahan pertanian semakin lama semakin berkurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah pemukiman maupun kegunaan lain yang juga sesuai dengan perkembangan wilayah.

e) Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis memiliki luas wilayah 170 km atau sebesar 5,12% dari luas Kota Yogyakarta. Kecamatan Jetis terdiri dari 3 Kelurahan, yaitu Bumijo,

Gowongan dan Cokrodiningratan. Berdasarkan hasil registrasi penduduk Kecamatan Jetis memiliki penduduk sebanyak 27, 235 dengan mata pencarian sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan. Hal ini didukung oleh banyaknya perkantoran, dan tempat perdagangan/pasar yang ada di Kecamatan Jetis.

f) Kecamatan Kraton

Kecamatan ini terbagi menjadi 3 kelurahan yaitu Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, dan Kelurahan Kadipaten. Luas wilayah Kecamatan Kraton adalah 1,40 km² atau sebesar 4,31 % dari luas Kota Yogyakarta. Kelurahan terluas di Kecamatan ini adalah Kelurahan Panembahan 0,66 km², kemudian Kelurahan Patehan 0,40 km², dan yang paling kecil wilayahnya Kelurahan Kadipaten 0,34km².

g) Kecamatan Gedongtengen

Kecamatan Gedongtengen memiliki luas hanya 0,96 km² terbagi menjadi dua kelurahan. Kelurahan Pringgokusuman 0,46 km² dan Kelurahan Sosromendura 0,50 km². Secara keseluruhan Kecamatan Gedongtengen terdiri dari 36 RW dan 139 RT.

h) Kecamatan Mantriheron

Kecamatan Mantriheron terletak di Kota Yogyakarta bagian selatan, berbatasan dengan Kabupten Bantul dengan luas 2,61 km² dan masih memiliki tanah sawah seluas 1,00 ha. Kecamatan Mantriheron terdiri dari tiga Kelurahan, yaitu Gedongkiwo, Suryodiningratan, dan Mantriheron.

9. Perkumpulan Idea

IDEA sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber daya, karena pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.

IDEA menfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium, kesetaraan & keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga.

Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk pewujudan kebijakan ini membutuhkan keberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.

Visi dan misi yang diusung adalah terwujudnya kedaulatan rakyat di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak

ekonomi, sosial dan budaya rakyat serta mendorong proses-proses politik yang demokratis untuk pemenuhan hak-hak dasar warga melalui perubahan kebijakan, penguatan basis dan peningkatan kesadaran publik.

10. CIQAL (*Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities*)

Yayasan CIQAL, atau biasa disebut CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities/Pusat untuk Pengembangan Kegiatan yang Berkualitas dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas*) adalah lembaga yang melaksanakan program-program upaya pemberdayaan ekonomi dan advokasi bagi penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.

Organisasi CIQAL mempunyai maksud meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas, agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan Organisasi adalah:

1. Menyediakan layanan informasi, komunikasi, konsultasi, dan advokasi kesejahteraan social penyandang
2. Melaksanakan program kajian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan social penyandang
3. Mewujudkan warga masyarakat penyandang disabilitas yang percaya diri, berkemauan dan berkemampuan untuk hidup

4. Mewujudkan warga masyarakat penyandang disabilitas yang mampu memberdayakan potensi dirinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan
5. Menjalin kerjasama / kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat disabilitas
6. Mewujudkan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang

11. *Humanity & Inclusion* (HI)

Humanity & Inclusion (nama baru *Handicap International*) adalah organisasi bantuan independen dan tidak memihak yang bekerja dalam situasi kemiskinan dan pengucilan, konflik dan bencana. Kami bekerja bersama orang-orang penyandang cacat dan populasi rentan, mengambil tindakan dan memberikan kesaksian untuk menanggapi kebutuhan esensial mereka, meningkatkan kondisi kehidupan mereka dan mempromosikan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak dasar mereka.

Bersama dengan mitra lokal, kami mengembangkan program dalam kesehatan dan rehabilitasi dan integrasi sosial dan ekonomi. Kami bekerja dengan pihak berwenang setempat untuk membersihkan ranjau darat dan puing-puing perang lainnya dan untuk mencegah kecelakaan terkait ranjau melalui pendidikan. Kami merespon dengan cepat dan efektif terhadap bencana alam dan sipil untuk membatasi cedera serius dan permanen dan untuk membantu pemulihan dan reintegrasi korban. Kami mengadvokasi pengakuan universal atas hak-hak penyandang cacat melalui perencanaan dan advokasi nasional.

Tindakan *Humanity & Inclusion* di Indonesia fokus pada empat bidang utama: hak dan kebijakan disabilitas, pendidikan inklusif, dan pengurangan risiko bencana. Organisasi ini meluncurkan operasinya di Indonesia pada Januari 2005 dengan menawarkan dukungan terapi fisik kepada para korban tsunami 2004 yang terluka. Program ini menjadi regional pada tahun 2017 dan mencakup Filipina, Indonesia dan Timor-Leste. Saat ini, 21 orang Indonesia melaksanakan misi *Humanity & Inclusion*.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas setelah kampanye advokasi intensif oleh organisasi penyandang cacat dengan dukungan aktif *Humanity & Inclusion*. Terlepas dari kemajuan ini, orang-orang Indonesia dengan disabilitas menghadapi tingkat diskriminasi dan stigmatisasi yang tinggi, terutama mereka yang hidup dalam isolasi dan kemiskinan. Secara keseluruhan, Indonesia menawarkan sangat sedikit layanan disabilitas, dan layanan yang ada, mayoritas tidak dapat diakses dan dikelola oleh teknisi yang kurang berkualitas.

63 Negara dan 8 Asosiasi Nasional. (HI, 2018)

12. Kelompok Kelurahan Inklusif

Kelompok kelurahan inklusif adalah kelompok yang bekerja sama dengan 3 *stakeholder* yaitu, perkumpulan idea, CIQAL, dan HI. Kelompok kelurahan mendapatkan pelatihan keorganisasian dari ketiga *stakeholder* tersebut. Kelompok kelurahan juga memiliki usulan program yang akan segera direalisasikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta mengenai Pembangunan Rumah Layanan Disabilitas.

a) Kelompok Baciro

Kelompok Baciro bertempat di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman.

Tabel 4.3
Kelompok Baciro

Wilayah	Nama Usulan	Beneficiaries	Jumlah (laki-laki & perempuan)
Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman	Pemberdayaan kelompok rentan melalui pengelolaan bank sampah	Masyarakat miskin disabilitas, orangtua disabilitas dan kelompok rentan lainnya	20 Orang

b) Kadipaten Lestari

Kelompok Kadipaten Lestari bertempat di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

Tabel 4.4
Kadipaten Lestari

Wilayah	Nama usulan	beneficiaries	Jumlah (laki-laki & perempuan)
Kel. Kadipaten, Kec. Kraton	Pemberdayaan ekonomi produktif: pelatihan pembuatan kue	Masyarakat miskin disabilitas, orangtua disabilitas dan kelompok rentan lainnya	22 Orang

c) Cokro Selaras Ati

Kelompok Cokro Selaras Ati bertempat di Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis.

Tabel 4.5
Cokro Selaras Ati

Wilayah	Nama usulan	beneficiaries	Jumlah (laki-laki & perempuan)
Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis	Pemberdayaan ekonomi produktif:	Masyarakat miskin disabilitas, orangtua	27 Orang

	pelatihan membatik	disabilitas dan kelompok rentan lainnya	
--	-----------------------	---	--

13. *Deaf Art Community*

Deaf Art Community Yogyakarta adalah sebuah komunitas yang dibangun untuk memberdayakan para tuna rungu (tuli) melalui beragam aktivitas seni-pertunjukan dan budaya. Komunitas ini berada di sebuah kontrakan yang dihuni oleh tiga komunitas sekaligus yang sama-sama bergerak di bidang seni, yaitu Kluwung Indonesia dan *Gallery of Studio* “Omah Gumyah”. Awal mula terbentuknya DAC tidak terlepas dari peran Galuh Sukmara, pendiri sebuah komunitas tuli bernama “Matahariku” di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Ia adalah seorang tuna rungu yang mengajak kawan-kawannya sesama tuna rungu untuk tampil di panggung dalam sebuah acara penggalangan dana untuk pengidap kanker. Setelah berpindah ke Australia, komunitas tersebut kemudian bubar. Namun, rekan Galuh bernama Babe bertekad untuk terus melanjutkan apa yang telah dimulai sebelumnya. Akhirnya, lahirlah *Deaf Art Community*.

Kegiatan utama *Deaf Art Community* tetap melakukan latihan di bidang seni pertunjukan. Kegiatan yang biasa mereka lakukan antara lain sulap, pantomim, teater, *hip-hop dance*, musik perkusi, puisi visual, basket *freestyle*, dan kegiatan seni rupa seperti melukis, dan membuat film pendek. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pertunjukan seni yang mereka tampilkan, kini anggota DAC hanya menampilkan pertunjukan yang sesuai dengan permintaan penyelenggara pertunjukan. Di samping itu, DAC juga melakukan kegiatan mengajar bernama Sekolah Semangat Tuli. Hal itu mereka lakukan ketika tidak sedang ada permintaan

untuk tampil. Di dalam program mengajar tersebut, terbagi menjadi dua kelas besar, yaitu kelas Bahasa isyarat dan kelas Bahasa Indonesia untuk tuli.

Kelas Bahasa isyarat dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu. Ada dua kelas untuk kelas Bahasa isyarat jam 8 pagi sampai 10 pagi dan 10 pagi sampai 12 siang. Siapapun boleh ikut belajar Bahasa isyarat, sedangkan Kelas Bahasa Indonesia diadakan setiap hari Jumat.

14. Gerkatin

Gerkatin merupakan singkatan dari Gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Gerkatin bergerak pada penengah, sosialisasi, perlindungan, dan pemberdayaan.

- Penengah
Menjadi jembatan (penengah) antara Tuna Rungu dengan kemitraan
- Sosialisasi
Meningkatkan Kepedulian dan Kesadaran Publik tentang arti tuna rungu
- Perlindungan
Melindungi dan advokasi hak-hak Tuna Rungu
- Pemberdayaan
Memberdayakan Penandang Tuna Rungu agar dapat turut serta sebagai pelaku pembangunan negara

15. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)

SIGAB adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independent, nirlaba, dan non-partisan. Organisasi ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. SIGAB berpandangan bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup (SIGAB, 2014).

Terwujudnya masyarakat inklusi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum Difabel untuk hidup setara dan berkeadilan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, huku serta teknologi dan pelayanan publik merupakan visi SIGAB. Misi dari SIGAB, sebagai sasana utama gerakan komunitas Difabel yang berartabat, progresif dan kreatif untuk terwujudnya revolusi menuju masyarakat inklusif di Indonesia, melalui: penelitian dan pemutakhiran data dan informasi Difabilitas; kampanye dan pendidikan publik; advokasi kebijakan; serta aksi kolektif yang masif. Mandat utama SIGAB adalah menjadi wadah perjuangan advokasi kelompok masyarakat Difabel untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang inklusif.